

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI  
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)  
TRIWULAN III PERIODE TANGGAL 1 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023**



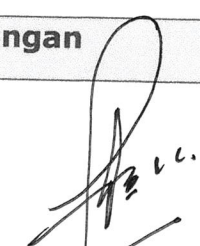
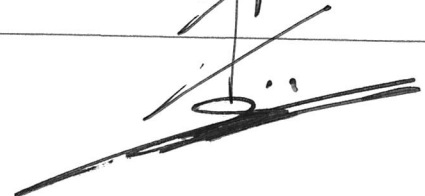
**TAHUN 2023**

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI  
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)  
TRIWULAN III PERIODE TANGGAL 1 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan III Tanggal 1 Juli 2023 s.d. 30 September 2023	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPKP Periode Triwulan III Tanggal 1 Juli 2023 s.d. 30 September 2023, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 8 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. U1 Dengan Nilai 974;</li> <li>2. U3 Dengan Nilai 978;</li> <li>3. U7 Dengan Nilai 980;</li> </ol>	<p>➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.</p>
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: <b>Respon (U1)</b>	<p>&gt; Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur ke-1 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ?</li> </ul>	<p>Rekomendasi:</p> <p>➤ Telah tersedia informasi pelayanan pada website dan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Palembang</p>

2	<b>Prosedur (U3)</b>	<p>&gt; Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?</li> </ul>	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Telah terdapat prosedur berperkara dan informasi pada website Pengadilan Negeri Palembang</li> </ul>
3	<b>Performa (U7)</b>	<p>&gt; Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah petugas yang memberikan pelayanan pada pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?</li> <li>-</li> </ul>	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Telah dilakukan brifing pada petugas PTSP yang dilakukan oleh Hakim Pengawas untuk selalu mengingatkan petugas agar dapat membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna layanan</li> </ul>

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	

# Eviden tindakan lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

## Point 1



INFORMASI LAYANAN PADA WEBSITE



Denda Tilang



Surat Keterangan



E-Court



Direktori Putusan



Info Perkara



Pengaduan

## Menu Tentang Pengadilan

PROFIL PENGADILAN >

Sistem Pengelolaan Pengadilan >

**Standar Pelayanan**

E-Learning

Rencana Strategis

Rencana Kerja Anggaran

Pengawasan dan Kode Etik Hakim

Kegiatan Pengadilan

Daftar Aset dan Inventaris

# Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang

DITULIS OLEH ADMIN ON 27 SEPTEMBER 2017. POSTED IN PENGUMUMAN

Cetak E-mail



Standar Pelayanan Hukum 2023.pdf



Standar Pelayanan Pidana 2023.pdf



STANDAR PELAYANAN PADA WEBSITE



## Point 2

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**  
Jalan Kapitan A. Rivai No.18 Palembang  
Telpun/ Fax (0711) 313566 - 363310 Email : pnpalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia ▾  
search...

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BULAN MEI 2023 - Rabu, 14 Jun 2023

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

### PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sitem konvensional atau elektronik.

**Perkara Perdata**

Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana dapat diajukan dengan cara konvensional maupun Elektronik.

1. Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya radius para pihak yang berperkara. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain :
  - Surat Gugatan/Surat Permohonan
  - Surat Kuasa (Jika Menggunakan Kuasa)
  - Fotokopi Kartu Identitas Prinsipal

## PROSEDUR BERPERKARA

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BULAN MEI 2023 - Rabu, 14 Jun 2023

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

### PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Prosedur Biasa digunakan dalam hal :

1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
2. Informasi yang diminta bervolume besar.
3. Informasi yang diminta belum tersedia, atau
4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

## PROSEDUR INFORMASI

Point 3



BRIEFING PETUGAS PTSP